

PERANAN PARTAI DEMOKRAT KOTA BANJARMASIN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK DI ERA MILLENIAL

Abid Rahmatullah^{1*}, Siti Alya Rosyifa², Nor Laily Yasmin³, Bahdiah⁴, Muzahid Akbar Hayat⁵

^{1,2,3,4,5} Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

*Corresponding Author:
Email: abid46.aa@gmail.com

Abstract.

This research departs from the suffering of the millennial generation who are less literate about politics, do not even want to contribute in political matters, so we want to know what is the role of political parties, especially the Democratic party, in realizing educational politics among millennials. This study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that to achieve political awareness in society, especially millennials, it will be created if there is educational politics. The form of Democratic political education is participating in press conferences, political campaigns to the regions, talk shows on TV and radio, as well as political speeches seen as media for campaigning on political education, especially for the people in Banjarmasin. Democrats have not been able to carry out political education to the fullest because there are still many obstacles they face.

Keywords: Role, Political Parties, Political Education, Democratic Party

1. PENDAHULUAN

Kekuatan sesungguhnya negara demokrasi bukan terletak pada negara atau pemerintahannya, akan tetapi pada warga negaranya. Di negara demokrasi rakyat sipil bebas memenuhi segala kebutuhannya, bebas memperbaiki nasib sendiri, dan bebas berkembang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Maka tugas utama dari negara demokrasi adalah mengembangkan segenap potensi yang terdapat pada rakyatnya dalam suasana yang damai dan adil. Untuk pelaksanaan demokrasi setidaknya diperlukan peranan politik untuk membentuk sikap demokrasi kalangan warga negara agar tercapai sebuah kreasi masyarakat sebagai basis sumber daya politik, pemindahan atau pengoperan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai moral. Warisan benda-benda budaya, keyakinan agama yang dianut, pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Tingginya tingkat pendidikan dan kebudayaan rakyat akan menjadi suatu ukuran bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan. Sebab itulah negara, terutama negara demokrasi, sangat berkepentingan dengan pendidikan seluruh warga negaranya demi menanamkan norma- norma demokrasi dan ikut bertanggung jawab atas diterapkannya asas demokrasi.

Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat, kehadiran partai politik merupakan syarat utama, negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan - badan perwakilan rakyat. Pada dasarnya pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik merupakan salah satu penerimaan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang tujuan kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat vital dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

Partai politik khususnya partai demokrat dapat mengambil peranan penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang terpadu.

Dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan bisa diterapkan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Perlu kita sadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai asset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggungjawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian, disamping adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai. Dalam negara demokrasi modern, partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara, karena tidak ada seorang pakar yang dapat menolak kehadirannya, karena partai politik sangat diperlukan kehadirannya bagi negara merdeka dan berdaulat. Kesemua fungsi ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokrasi, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Partai politik khususnya partai demokrat merupakan salah satu institusi inti dan demokrasi modern. Demokrasi modern mengadatkan sebuah sistem yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti (DPR, DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Partai politik seharusnya melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga dapat menjadikan suatu negara yang demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak semua fungsi tersebut telah dilaksanakan oleh partai-partai politik yang ada. Meingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering bahkan keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang disuatu Negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dan suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan. Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik antarlain ialah berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sadar akan hak dan kewajiban suatu tanggung jawabnya sebagai warga Negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian warga negara yang baik adalah warga negara yang selalu siap melaksanakan hak dan kewajibannya secara suka rela dengan penuh kesungguhan baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Warga negara tersebut dapat terbentuk melalui pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terutama partai demokrat di Kota Banjarmasin. Demokrat yang dikenal sebagai salah satu partai besar di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus dan masyarakat luas agar terbentuknya warga negara yang cerdas akan politik dan bertanggung jawab dalam hal politik.

Adapun fungsi partai demokrat yang tertuang dalam anggaran dasar pasal 13 ayat 1 “Penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya”. Mengacu pada anggaran dasar tersebut, terlihat jelas bahwa Demokrat mempunyai dasar yuridis untuk melaksanakan pendidikan politik kepada kader, pengurus serta masyarakat luas agar cerdas politik.

II. METODE

Kegiatan penelitian dilakukan pada DPD Demokrat Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Anang Andenasi No.4 Teluk dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. 05114230577. Jenis penelitian yang digunakan pada pembuatan jurnal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana tujuan dari penelitian ini agar penulis dapat memperoleh informasi dan data untuk mengetahui Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik di era Millenial. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan pihak Partai Demokrat Kota Banjarmasin. Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi dan studi pustaka untuk mendapatkan data dan informasi yang akan digunakan untuk merancang dan menganalisa Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik di era Millenial.

Menurut Newman (2013) wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta,

kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Metode mengumpulkan data yang terakhir adalah dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan referensi buku-buku dan referensi dari internet yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam merancang jurnal Peranan Partai Demokrat Kota Banjarmasin Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik di era Millenial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai partai politik, Partai Demokrat adalah salah satu wadah atau organisasi yang berjuang untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membangun jiwa pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi, pendidikan politik dengan nilai-nilai keindonesiaan yang didapatkan oleh seorang calon pemimpin bangsa diantaranya bisa didapatkan melalui partai politik salah satunya Partai Demokrat. Hal tersebut di dapat dari proses pendidikan politik baik yang di dapatkan dari pendidikan formal maupun dari pendidikan non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Alfian dalam jurnal Nasiwan menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso). Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba dalam jurnal Sunarso).

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Adanya suatu program pendidikan politik yang sebelumnya telah terprogram, mulai dari waktu pelaksanaan program pendidikan politik, kurikulum pendidikan politik, metode pendidikan politik sampai pada evaluasi pendidikan politik tersebut. Pendidikan politik yang ikut dijalankan oleh Partai Demokrat Banjarmasin selain bertujuan untuk membuat seseorang menjadi orang yang berkarakter juga bertujuan untuk memberi latihan, ajaran serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri, sehingga masyarakat dan kader partai khususnya dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warganegara Indonesia, maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia. Pendidikan politik

disebut pula sebagai political forming atau Bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bindung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. (Kartini Kartono, 2009: 63) Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggungan dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan budaya).

Menurut (Kartini Kartono, 2009: 63) Politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku tengah masyarakat. Aturan dan keputusan tadi ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, ditengah medan sosial yang dipenuhi kemajemukan/kebinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik. Oleh adanya kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam itu perlu ditegakkan tata tertib. Keikutsertaan kita dalam aktivitas politik artinya kita ikut menentukan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di masyarakat. Misalnya kita memilih seseorang pemimpin, tentunya pemimpin tersebut apabila terpilih dalam pemilihan umum dan berkuasa, dia mempunyai hak untuk menentukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam masyarakat dan mau tidak mau masyarakat harus mengikutinya. Pemimpin tadi yang menentukan bentuk pemerintahan yang ada. Terpilihnya pemimpin tersebut tentunya sebab dari keterlibatan kita dalam berpolitik (misal pemilu), dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita pilih walaupun peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tadi tidak menguntungkan bagi kita atau bahkan merugikan kita. Karena itu adalah konsekuensi yang harus kita terima saat kita terlibat dalam aktivitas politik.

Pentingnya melakukan edukasi seperti mensosialisasikan informasi, program dan kebijakan dalam menyebarluaskan pendidikan politik agar dapat diterima masyarakat. Firmanzah (2008) menyatakan bahwa penggunaan metode marketing di bidang politik yang dikenal sebagai political marketing digunakan untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efektif dalam menciptakan hubungan dua arah dengan masyarakat. Hubungan tersebut contohnya seperti melakukan kampanye politik yang merupakan suatu proses komunikasi politik, di mana partai politik atau kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi ataupun program kerja yang mereka tawarkan. Partai Demokrat ikut berpartisipasi dalam konferensi pers, kampanye politik ke daerah-daerah, talk show di TV maupun di radio, serta pidato-pidato politik dilihat sebagai media untuk kampanye mengenai pendidikan politik terutama untuk masyarakat di Banjarmasin. Berbagai temuan lapangan terkait dengan pendidikan politik di Banjarmasin

IV. KESIMPULAN

Peranan partai Demokrat di Banjarmasin dalam mewujudkan pendidikan politik di era milenial sudah terlaksana sesuai dengan fungsi partai demokrat yang tertuang dalam anggaran dasar pasal 13 ayat 1 “Penyelenggaraan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya”. Mengacu pada anggaran dasar tersebut, terlihat jelas bahwa Demokrat mempunyai dasar yuridis untuk melaksanakan pendidikan politik kepada kader, pengurus serta masyarakat luas agar cerdas politik.

Peranan partai Demokrat di Banjarmasin dalam mewujudkan pendidikan politik di era milenial adalah dengan keterwakilan, baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti (DPR, DPRD), terutama di Kota Banjarmasin di setiap Komisi mereka ada perwakilan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan untuk Bidang Pendidikan berada di Komisi 4.

Program pendidikan politik yang sebelumnya telah terprogram, mulai dari waktu pelaksanaan program pendidikan politik, kurikulum pendidikan politik, metode pendidikan politik sampai pada evaluasi

pendidikan politik tersebut. Pendidikan politik yang ikut dijalankan oleh Partai Demokrat Banjarmasin selain bertujuan untuk membuat seseorang menjadi orang yang berkarakter juga bertujuan untuk memberi latihan, ajaran serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri, sehingga masyarakat dan kader partai khususnya dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara

REFERENSI

- Agustiningih, M. Y., & Gunawati, D. (2017). *Pengaruh Model Pembelajaran Konsiderasi terhadap Sikap Toleransi Siswa pada Kompetensi Dasar Menghargai Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika*. Educitizen, 2(2).
- Anwar, S., Kudadiri, S., & Wijaya, C. (n.d.). *Peran Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Aceh Tenggara sebagai Agents of Social Change*. Anthropolos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 4(2), 179–187.
- Bahari, 2010. *Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. Jakarta.
- Fariza, E. (n.d.). *Pengaruh Kepribadian Terhadap Motivasi Akademik, Efikasi Diri, Dan Kecerdasan Emosional Pada Mahasiswa*. Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad, N. (2015). *Penanaman Toleransi Beragama pada Anak Melalui Pendidikan*. Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat, 2(1), 252.
- Goleman, D. (2006). *Emotional intelligence*. Bantam.
- Hendropuspito, D. (n.d.). OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hornby, A. S., & Cowie, A. P. (1995). *Oxford advanced learner's dictionary* (Vol. 1430). Oxford university press Oxford.
- Juri, J. (2015). *Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara melalui Pendidikan Politik (Studi Kasus pada Partai Politik Pdi Perjuangan di Kabupaten Sintang)*. Vox Edukasi, 6(2), 123-142.
- Kinloch, G. C. (2005). *Sociological Theory: Development and Major Paradigm*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuswara, G. B. (2015). *Faktor Internal Mahasiswa Dan Citra Unit Kegiatan Mahasiswa Bandung Santo Club Dalam Menentukan Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti Secara Aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Bandung Santo Club Di Universitas Widyatama*. Universitas Widyatama.
- Luth, T. (2002). *Masyarakat madani: solusi damai dalam perbedaan*. Mediacita.
- Magnis-Suseno, F. (1998). *Mencari makna kebangsaan*. Penerbit Kanisius.
- Marzuki, M. (2006). *Dari Nalar Fikih Menuju Nalar Undang-Undang (Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Legislasi Nasional)*. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 3(1), 13–28.
- Nawawi, H. (1985). *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Newman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (edisi 7), PT Indeks; Jakarta
- Oktriany, W. H., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2018). *Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi Dengan Model Charlotte Danielson*. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(1), 24–36.
- Tarsidi, D. Z. (2018). *Berfungsi Pendidikan Politik Di Mesin Partai Politik*, Jurnal Pendidikan kewarganegaraan